



Beujroh :

Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat

Volume 4, Nomor 1, Februari 2026 pp. 155-174

DOI <https://doi.org/10.61579/beujroh.v4i1.814>

e-ISSN 3025-9320

p-ISSN 3026-0884

Lokakarya Pengembangan Kurikulum Sekolah Berbasis Karakteristik Komunitas Selingkar di MIS Thariqul Huda Tulungagung

Muh. Basuni¹, Puspita Mayaratri^{2*}

¹UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia, email: Basuni@uinsatu.ac.id

²UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia, email: puspitamayaratri@uinsatu.ac.id

*Koresponden penulis : puspitamayaratri@uinsatu.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 02 Februari 2026

Diterima: 04 Februari 2026

Diterbitkan: 04 Februari 2026

Keywords:

School Curriculum;
Circle Community;
Elementary School.

Kata Kunci:

Kurikulum Sekolah;
Komunitas Selingkar;
Madrasah Ibtidaiyah.



Abstract

This community service program aims to assist madrasas in Tulungagung, East Java, particularly private elementary madrasas, in developing their curricula independently to align with the needs and characteristics of their surrounding communities. This type of mentoring is crucial, especially for private elementary madrasas, to enable them to compete with other madrasas and government-run elementary schools. This mentoring program is implemented through a series of activities consisting of training and mentoring. The training results demonstrated increased knowledge among teachers and principals. The mentoring activities resulted in a review of the madrasah's vision and mission and strengthened teachers' and principals' commitment to remain adaptive to developments. The conclusions from this community service implementation demonstrate the importance of collaboration between universities and schools in improving academic and institutional quality.

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan membantu madrasah di Tulungagung, Jawa Timur, khususnya madrasah ibtidaiyah swasta dalam mengembangkan Kurikulum Madrasah secara mandiri agar menghasilkan Kurikulum Madrasah yang mampu selaras dengan kebutuhan dan karakteristik Masyarakat selingkar sekolah. Pendampingan seperti ini sangat penting khususnya bagi madrasah ibtidaiyah swasta agar mampu bersaing dengan madrasah-madrasah



Lisensi: *cc-by-sa*
Copyright © 2026
penulis

maupun sekolah dasar yang lain khususnya yang dikelola oleh pemerintah. Program pendampingan ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari pelatihan dan pendampingan. Hasil dari pelatihan menunjukkan peningkatan pengetahuan para guru dan kepala sekolah. Kegiatan pendampingan menghasilkan peninjauan visi misi madrasah dan penguatan komitmen di kalangan guru dan kepala sekolah untuk selalu adaptif dengan perkembangan. Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dengan sekolah dalam meningkatkan kualitas akademik dan lembaga.

Cara mensitasi artikel:

Basuni, M., & Mayaratri, P. (2026). Lokakarya Pengembangan Kurikulum Sekolah Berbasis Karakteristik Komunitas Selingkar di MIS Thariqul Huda Tulungagung. *Beujroh : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(1), 155-174. <https://doi.org/10.61579/beujroh.v4i1.814>

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan pesat faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan program strategis, dukungan sekolah, kualitas guru, infrastruktur, serta perencanaan strategi yang matang. Sebagai contoh, rendahnya budaya literasi telah mengakibatkan sumber daya manusia yang kurang kompetitif karena minimnya penguasaan sains dan teknologi, yang berakar dari rendahnya minat baca dan kemampuan literasi dasar (Arifin, 2024). Hidayat et al., (2018) mengungkapkan bahwa masalah literasi ini harus segera diatasi dengan strategi manajemen yang terencana dengan baik, diiringi peran aktif pemangku kepentingan sekolah (kepala sekolah, guru, pustakawan) untuk membangun budaya literasi peserta didik. Tanpa dukungan dan infrastruktur memadai, program peningkatan mutu seperti gerakan literasi sekolah sulit berhasil. Masalah internal lain yang kerap muncul adalah perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Hal ini perlu ditangani secara sistematis melalui kebijakan atau peraturan sekolah (Fransiscus et al., 2024). Penelitian global pun menegaskan bahwa kebijakan *anti-bullying* yang komprehensif di tingkat sekolah dapat menurunkan insiden

perundungan secara signifikan jika dirancang berbasis bukti dan diimplementasikan secara konsisten.

Faktor internal lainnya adalah kualitas dan peran guru. Guru tidak hanya berkontribusi pada faktor internal sekolah, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal, sehingga menjadi penentu kualitas layanan pendidikan. Irnidayanti & Fadhilah, (n.d.) menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan Indonesia adalah kualitas guru yang masih rendah. Kualitas guru - mencakup kualifikasi, kompetensi pedagogis, serta motivasi - terbukti sangat krusial bagi pencapaian belajar siswa. Sayangnya, berbagai masalah masih ditemukan, seperti kurangnya pelatihan profesional, proses rekrutmen guru yang belum sepenuhnya berbasis merit, dan rendahnya motivasi guru. Banyak guru di Indonesia belum memenuhi standar kompetensi minimum; hasil Uji Kompetensi Guru menunjukkan skor yang rendah secara nasional, menandakan masih lemahnya penguasaan materi ajar dan pedagogi. Kondisi ini menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, sehingga berpengaruh pada mutu layanan sekolah secara keseluruhan. Konsekuensinya, setiap kasus dan dinamika internal di sekolah harus dipertimbangkan secara sistematis dalam bentuk pembaruan kebijakan atau manajemen sekolah, misalnya melalui revisi kurikulum, agar permasalahan internal tersebut dapat ditangani dan kualitas pendidikan meningkat.

Di sisi lain, faktor eksternal yang memengaruhi pengembangan kurikulum sekolah mencakup perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harapan masyarakat, serta regulasi pemerintah. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut integrasi teknologi dalam pembelajaran dan penyesuaian kurikulum terhadap era digital. Integrasi teknologi di sekolah memerlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai, literasi digital pada pendidik dan peserta didik, serta dukungan pelatihan profesional berkelanjutan bagi guru. Catacutan & Abendan (2023) menegaskan bahwa penerapan teknologi pendidikan yang efektif hanya dapat tercapai apabila infrastruktur TIK di sekolah memadai, pengguna (guru dan siswa) memiliki kompetensi digital, dan terdapat program professional development yang berkesinambungan bagi guru untuk mengadopsi pedagogi berbasis teknologi. Kenyataannya, banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi

keterbatasan infrastruktur dan akses internet yang tidak merata, yang menghambat pembelajaran digital.

Tantangan eksternal berikutnya adalah harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat menginginkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan nyata dan konteks lokal. Melibatkan suara komunitas dalam pengembangan kurikulum terbukti dapat meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa proses *community needs assessment* (analisis kebutuhan masyarakat) mampu meningkatkan kualitas kurikulum, keterlibatan peserta didik, dan hasil belajar. Nkonkonya & Sithabile (2024) merekomendasikan pelibatan aktif anggota masyarakat dalam seluruh tahap pengembangan kurikulum, agar pengetahuan, keahlian, dan perspektif mereka terintegrasi dalam kurikulum. Dengan demikian, kurikulum akan lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan lingkungan masyarakatnya.

Dari perspektif kebijakan pemerintah, regulasi sangat menentukan arah kurikulum sekolah. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia meluncurkan kurikulum pendidikan dasar yang disebut Kurikulum Merdeka (yang kemudian menjadi kurikulum nasional terbaru) sebagai upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi dan peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi sekolah. Menurut peraturan terbaru, setiap satuan pendidikan diimbau mengembangkan kurikulum operasional sekolahnya dengan prinsip diversifikasi sesuai kondisi masing-masing sekolah, potensi daerah, dan karakteristik peserta didik. Artinya, pemerintah menetapkan kerangka kompetensi lulusan secara nasional, namun implementasi kurikulum pada tingkat sekolah dapat disesuaikan agar lebih kontekstual. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang cenderung sentralistik, Kurikulum Merdeka menekankan prinsip fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, dan pengembangan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum ini memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk berinovasi dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan setiap peserta didik. Abidin juga mencatat bahwa dalam kurikulum baru, satuan pendidikan dan guru memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum serta perangkat pembelajaran sesuai kebutuhan dan konteks sekolah mereka. Kebijakan desentralisasi

kurikulum ini memungkinkan sekolah memanfaatkan potensi lingkungan sekitarnya dalam proses pembelajaran, sehingga kurikulum menjadi lebih relevan dengan kondisi nyata (Abidin et al., n.d.). Namun, memberikan otonomi kurikulum kepada setiap sekolah menuntut kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola sekolah yang memadai.

Mengingat bahwa setiap sekolah diharapkan mengembangkan kurikulumnya sendiri berdasarkan analisis kebutuhan yang sistematis, sementara tidak semua sekolah memiliki pengalaman dan kapasitas yang cukup dalam hal tersebut, partisipasi akademisi atau pakar berpengalaman sangat diperlukan. Kolaborasi antara sekolah dan pihak perguruan tinggi atau pakar pendidikan dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Para pakar dapat membantu menyelaraskan kebijakan kurikulum (teori) dengan realitas di lapangan (praktik), sehingga pengembangan kurikulum sekolah lebih terarah dan berbasis bukti. Melibatkan pemangku kepentingan eksternal juga diakui efektif untuk memperkuat proses pengembangan kurikulum. Sebuah kajian oleh Porter et al., (2020) menyarankan agar sekolah melibatkan ahli atau stakeholder luar sejak awal proses revisi kurikulum, karena perspektif dan keahlian eksternal dapat menghasilkan keluaran kurikulum yang lebih kokoh dan inovatif.

Demikian pula, ahli pendidikan menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan bagi guru dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Sekolah disarankan untuk mengundang pakar dan akademisi guna melatih guru dalam pengembangan kurikulum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan guru merancang dan melaksanakan kurikulum secara mandiri. Oleh sebab itu, program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Program ini diharapkan dapat mendampingi dan memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan sekolah (kepala sekolah, guru, dan komite sekolah) dalam menyusun kurikulum operasional sekolah yang selaras dengan kebijakan Kurikulum Merdeka dan kebutuhan spesifik sekolah. Dengan terlibatnya akademisi berpengalaman, pengembangan kurikulum sekolah dapat berlangsung lebih sistematis, terarah, dan sesuai teori-praktik terbaru.

Secara keseluruhan, program pengabdian masyarakat ini merupakan wujud partisipasi komunitas akademik dalam mendukung

pemerintah Indonesia menyediakan pendidikan dasar yang berkualitas. Melalui pendampingan pengembangan kurikulum di sekolah mitra, program ini membantu memastikan bahwa setiap sekolah mampu memenuhi tuntutan kebijakan kurikulum terbaru dengan tetap mempertimbangkan tantangan internal-eksternal yang dihadapi. Harapannya, kurikulum sekolah yang dihasilkan tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga relevan, kontekstual, dan efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran di masing-masing sekolah.

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat di MIS Thoriqul Huda Tulungagung dilaksanakan melalui beberapa rangkaian kegiatan yang meliputi (1) lokakarya, dan (2) pendampingan. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih tiga hari pada masa libur sekolah tahun ajaran 2024-2025. Rincian kegiatannya dijelaskan sebagai berikut:

(1) Lokakarya

Lokakarya ini diselenggarakan dalam bentuk presentasi atau diskusi kelompok terfokus. Selama lokakarya, para peserta akan disajikan beberapa topik yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Topik pertama adalah Analisis Kebutuhan untuk Pengembangan Kurikulum. Topik kedua adalah Tinjauan Kurikulum Nasional. Topik ketiga adalah Tinjauan Capaian Pembelajaran Nasional.

Pada topik pertama, peserta dilatih untuk melakukan analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats), Analisis Lingkungan, dan Analisis Kebutuhan Sekolah. Pada topik kedua, peserta diperkenalkan dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait Kurikulum Merdeka atau Kurikulum Nasional. Topik ketiga menyajikan hasil belajar nasional yang dianggap sebagai tujuan belajar standar atau sasaran belajar standar. Hasil belajar ini harus dipahami dengan baik oleh guru karena merupakan kompetensi belajar yang harus dicapai oleh guru.

(2) Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan setelah pelatihan. Tujuan pendampingan ini adalah untuk menghubungkan teori-teori selama sesi lokakarya dengan praktik para guru. Pendampingan dilakukan dengan membimbing peserta untuk mempraktikkan teori-teori yang

dipresentasikan dalam lokakarya. Pertama, peserta secara mandiri melakukan analisis SWOT dan analisis kebutuhan. Hasil analisis kemudian didiskusikan secara terbuka, dikritik, dan kemudian direvisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Fase 1: Lokakarya - Pemetaan Konteks Sekolah dan Analisis Kebutuhan

Fase pertama kegiatan pengabdian masyarakat di MIS Thariqul Huda Tulungagung dilaksanakan dalam bentuk lokakarya yang difokuskan pada analisis kebutuhan kontekstual sekolah. Dalam sesi ini, peserta yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru dibimbing untuk melakukan analisis geografis, demografis, sosial-keagamaan, potensi teknologi, serta posisi kelembagaan madrasah dibanding sekolah lain di sekitarnya.

Peserta dibagi ke dalam kelompok kerja kecil untuk mendiskusikan kondisi nyata sekolah, dipandu oleh lembar kerja analisis kebutuhan yang telah disiapkan oleh tim pelaksana. Lokakarya ini tidak hanya berfungsi sebagai forum identifikasi masalah, tetapi juga sebagai sarana internalisasi prinsip dasar Kurikulum Merdeka – yaitu kurikulum kontekstual yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan lokakarya

Hasil program pengabdian masyarakat dibahas berdasarkan tiga fase metode program pengabdian masyarakat sebagai berikut.

Berdasarkan survei yang diberikan setelah lokakarya, dapat diidentifikasi bahwa hasil lokakarya menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang cara melakukan analisis kebutuhan, analisis regulasi, dan analisis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ringkasan hasil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Lokakarya

Aspek-aspek	Hasil Analisis	Rekomendasi
Lokasi geografis	Madrasah ini terletak di daerah pinggiran kota, dikelilingi oleh sawah, ladang milik penduduk, dan kolam. Masjid berada di dekatnya.	Terdapat beragam sumber belajar yang dapat digunakan di sekolah.
Demografi	Komunitas di sekitar madrasah bersifat religius dan mayoritas berafiliasi dengan organisasi Nahdhatul Ulama.	Program-program budaya keagamaan perlu diperkuat.
Sekolah lain	Terdapat beberapa sekolah dasar negeri, dan madrasah swasta lainnya cukup dekat, tidak lebih dari 2	Penting untuk mendefinisikan kembali keunggulan, daya saing, dan keunikan Madrasah dibandingkan

	kilometer jauhnya.	dengan sekolah-sekolah lain.
Penggunaan teknologi	Sebagian besar siswa dan orang tua siswa sudah familiar dengan ponsel, media sosial, dan beberapa aplikasi seluler.	Madrasah ini mempromosikan pembelajaran berbasis seluler dan memanfaatkan media sosial untuk komunikasi /interaksi massa.
Latar belakang keluarga siswa	Sebagian besar keluarga pelajar berasal dari kelas ekonomi dan pendidikan yang rendah hingga menengah.	Madrasah mempromosikan program-program yang melibatkan keluarga siswa untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam mendidik anak-anak mereka.

Kelima temuan tersebut kemudian dirumuskan dalam rekomendasi awal bagi pengembangan kurikulum operasional madrasah. Proses ini merefleksikan pendekatan *school-based curriculum development* (SBCD), di mana kurikulum tidak hanya ditentukan secara *top-down* oleh pemerintah, tetapi juga dibentuk dari pemetaan kekuatan dan tantangan lokal ((Concepts et al., n.d.); (Nkonkonya & Sithabile, 2024)).

Beberapa peserta menyampaikan refleksi positif dari pengalaman ini. Salah satu guru menyatakan:

“Selama ini kami menyusun program tahunan hanya berdasarkan kalender akademik. Lewat diskusi hari ini, kami jadi sadar bahwa konteks sosial dan budaya kami sendiri juga penting masuk dalam kurikulum.”

Hal ini menunjukkan pergeseran orientasi dari sekadar menjalankan program administratif menjadi keterlibatan reflektif dalam desain pendidikan.

Kegiatan lokakarya juga mendorong peserta untuk mempertimbangkan prinsip diferensiasi dalam pembelajaran. Misalnya, dengan mempertimbangkan latar ekonomi dan akademik siswa, guru menyadari perlunya menyediakan materi dengan berbagai level kompleksitas dan metode pembelajaran multimodal.

Fase 2: Pendampingan - Revisi Visi-Misi dan Konsolidasi Komitmen Sekolah

Fase kedua berupa sesi pendampingan dilaksanakan sebagai lanjutan dari hasil analisis kebutuhan pada fase sebelumnya. Sesi ini diarahkan pada evaluasi kritis terhadap dokumen visi dan misi madrasah yang selama ini digunakan sebagai dasar perumusan program. Dalam Kurikulum Merdeka, visi dan misi sekolah menjadi kompas utama dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP). Karena itu, penting bagi madrasah untuk memiliki rumusan visi-misi yang tidak hanya normatif, tetapi juga menggambarkan identitas khas dan arah strategis yang realistis.

Pendampingan dilakukan secara dialogis dan berbasis studi dokumen. Para peserta diminta membawa naskah visi dan misi lama, lalu mendiskusikan setiap bagiannya dalam kelompok kecil. Fasilitator mendorong peserta untuk mengkritisi istilah-istilah yang umum digunakan namun kurang operasional seperti "unggul", "iman dan takwa", "madrasah pusat keunggulan", dan lain-lain.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan pendampingan

Berdasarkan diskusi dan observasi selama proses pendampingan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan menghasilkan revisi visi dan misi Madrasah serta penguatan komitmen di antara para pemangku kepentingan Madrasah.

Tabel 2. Ringkasan hasil pendampingan

Aspek-aspek Visi dan Misi	Hasil Analisis	Rekomendasi
Iman dan Taqwa	Istilah 'Iman dan Taqwa' dalam penglihatan tersebut tampaknya bersifat umum dan hanya serupa dengan aliran-aliran Islam lainnya.	Istilah 'Iman dan Taqwa' perlu didefinisikan secara lebih terukur dan layak, yang tercermin dalam misi dan program sekolah.
Pusat Keunggulan	Istilah 'keunggulan' terdengar ambigu	Dalam aspek apa atau dengan cara apa Madrasah

	dan sulit diukur. Se jauh mana madrasah itu unggul belum didefinisikan dengan baik dan belum dapat diukur .	unggul dibandingkan sekolah-sekolah di sekitarnya, sumber daya sekolah, dan harapan masyarakat?
Sekolah Landmark	Untuk komunikasi publik dan pemasaran massal, Madrasah belum merumuskan slogan atau ciri khas Madrasah yang tersirat dari visi dan misi yang kuat .	Disarankan untuk merumuskan slogan atau ciri khas madrasah yang kuat dan unik yang dapat menarik minat calon pelanggan.

Dari proses ini, muncul sejumlah refleksi penting, di antaranya:

Istilah “iman dan takwa” yang selama ini digunakan dalam visi madrasah dinilai terlalu generik dan tidak cukup mencerminkan kekhasan nilai-nilai Islam ala NU yang dianut madrasah. Salah satu guru menyampaikan,

“Kalau semua sekolah pakai ‘iman dan takwa’, lalu apa yang membedakan madrasah kita sebagai bagian dari tradisi NU?”

Dari diskusi ini, peserta menyepakati bahwa visi keagamaan harus didefinisikan secara lebih kontekstual, misalnya melalui indikator kegiatan yang mendukung karakteristik amaliyah NU seperti tahlilan, manaqiban, atau fikih *mazhab Syafi’i*.

Frasa “madrasah unggul” dikritik karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Apa yang dimaksud unggul belum dijabarkan: unggul dalam bidang apa, dibandingkan dengan siapa, dan berdasarkan indikator apa. Fasilitator kemudian memperkenalkan konsep *Unique*

Selling Proposition (USP) dalam pendidikan, yaitu aspek pembeda yang bisa menjadi daya tarik lembaga.

Absennya identitas visual atau slogan menjadi perhatian dalam sesi ini. Dalam era kompetitif, branding sekolah menjadi semakin penting. Salah satu usulan yang muncul adalah menambahkan frasa seperti “Madrasah Aswaja Digital” sebagai identitas publik yang menampilkan dua kekuatan utama: tradisi Islam dan pembelajaran berbasis teknologi.

Seluruh proses ini mencerminkan penerapan pendekatan *school visioning* sebagaimana dikembangkan oleh (Senge et al., n.d.), yaitu keterlibatan kolektif seluruh pemangku kepentingan sekolah dalam merumuskan arah masa depan lembaga. Selain memperkuat kepemilikan bersama terhadap visi, proses ini juga berperan mempererat komitmen tim pendidik.

Kepala madrasah, dalam sesi penutup pendampingan, menyampaikan bahwa proses ini mengubah cara pandang mereka terhadap visi dan misi:

“Ternyata visi dan misi bukan sekadar hiasan di dinding. Sekarang kami tahu, inilah yang akan jadi arah semua program madrasah.”

Proses pendampingan ini menunjukkan bahwa refleksi kolektif terhadap dokumen kelembagaan tidak hanya menghasilkan revisi redaksional, tetapi juga menciptakan pemahaman baru tentang fungsi strategis visi-misi sebagai dasar penyusunan kurikulum dan pengambilan keputusan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Fase 3: Kerja Mandiri - Penyusunan Draft Kurikulum dan Rencana Tindak Lanjut

Fase ketiga merupakan tahap kerja mandiri yang ditujukan untuk merancang draf awal Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil pendampingan sebelumnya. Dalam fase ini, peserta difasilitasi untuk menyusun kurikulum yang mengintegrasikan: Ciri khas madrasah berbasis nilai NU, Strategi pembelajaran yang adaptif terhadap karakteristik peserta didik, Pemanfaatan media dan teknologi, Struktur kurikulum yang fleksibel sesuai prinsip Kurikulum Merdeka.

Peserta dibagi dalam tim penyusun berdasarkan bidang tugas masing-masing, seperti: tim visi-misi, tim struktur kurikulum, tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5), dan tim asesmen. Beberapa keluaran konkret yang dihasilkan antara lain: 1. Visi dan misi yang direvisi, dengan indikator yang terukur dan disesuaikan dengan konteks madrasah berbasis Nahdlatul Ulama; 2. Struktur kurikulum yang menekankan tema-tema lokal seperti pertanian, sosial-keagamaan, dan kewirausahaan santri; 3. Model proyek P5 berbasis konteks lokal, seperti proyek “Kampung Ramah Anak” atau “Gerakan Literasi Pesantren.”; 4. Pemanfaatan aplikasi pembelajaran digital seperti *Canva* untuk membuat infografis keagamaan, serta *Google Classroom* dan *WhatsApp* sebagai alat komunikasi guru-siswa-orang tua; 5. Strategi asesmen alternatif, termasuk portofolio pembelajaran dan asesmen formatif berbasis refleksi.

Seluruh proses ini memperlihatkan bahwa madrasah mampu menerjemahkan prinsip kebijakan nasional ke dalam konteks lokalnya. Hal ini mencerminkan praktik terbaik dari pendekatan *School-Based Curriculum Development (SBCD)*, yang menurut Gordon et al., (n.d.) menekankan pada otonomi sekolah, relevansi lokal, dan partisipasi kolektif.

Fase ini juga menunjukkan bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan secara inklusif di lingkungan dengan keterbatasan. Guru-guru tidak mengandalkan perangkat mahal, tetapi memaksimalkan alat-alat yang akrab di masyarakat, seperti *WhatsApp* dan *Canva*. Ini membuktikan bahwa transformasi digital dalam pendidikan tidak selalu menuntut teknologi canggih, tetapi kecerdikan dalam memanfaatkan apa yang tersedia (Catacutan & Abendan, 2023).

Dalam sesi refleksi akhir, para guru mengakui bahwa proses penyusunan KOSP ini memberikan pengalaman baru:

“Biasanya kurikulum tinggal copy-paste dari madrasah lain. Sekarang kami paham bahwa menyusun kurikulum itu harus dimulai dari memahami siswa dan lingkungan kami sendiri.”

Pernyataan ini mengindikasikan terjadinya perubahan paradigma dari pendekatan administratif ke pendekatan kontekstual dan partisipatif.

Refleksi Umum, Tantangan, dan Implikasi Tindak Lanjut

Program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa dengan fasilitasi yang terstruktur dan pendekatan partisipatif, sekolah –termasuk madrasah berbasis keagamaan– mampu melakukan transformasi kurikulum berbasis konteksnya sendiri. Proses tiga tahap (lokakarya, pendampingan, dan kerja mandiri) memberikan jalur pembelajaran yang koheren: dari pemetaan kebutuhan hingga produk kurikulum yang otentik dan aplikatif.

Salah satu kekuatan utama dari kegiatan ini adalah keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan madrasah. Guru tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai perancang dan pelaku utama perubahan. Kepala sekolah tidak sekadar menjadi pengawas, tetapi pemimpin pembelajar. Keterlibatan seperti ini sejalan dengan prinsip *transformative leadership* dalam pengembangan sekolah (Hallinger, 2011).

Namun demikian, kegiatan ini juga mengungkap sejumlah tantangan:

1. Ketimpangan literasi kurikulum di antara guru, terutama bagi mereka yang belum terbiasa membaca kebijakan pendidikan atau dokumen perencanaan jangka panjang.
2. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam menyusun dokumen kurikulum secara mandiri, terutama di tengah beban administratif rutin.
3. Minimnya pengalaman dalam menyusun asesmen formatif dan proyek P5, terutama bagi guru yang terbiasa dengan pendekatan klasikal dan penilaian konvensional.
4. Kendala teknis, seperti keterbatasan perangkat dan jaringan saat memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran.

Tantangan-tantangan ini menjadi bahan refleksi penting. Untuk mengatasinya, diperlukan tindak lanjut berupa program pendampingan berkelanjutan, antara lain:

1. Pelatihan literasi kebijakan pendidikan dan kurikulum bagi guru secara rutin.
2. Forum kolaboratif antar madrasah untuk berbagi praktik baik (*coaching clinic* kurikulum).
3. Pengembangan modul pembelajaran berbasis konteks lokal.

4. Penugasan guru penggerak internal sebagai agen perubahan dan mentor bagi rekan sejawat.

Lebih jauh, madrasah perlu menyusun *roadmap* pengembangan kurikulum 3–5 tahun ke depan, termasuk agenda revisi periodik KOSP, penguatan asesmen, dan integrasi program unggulan berbasis komunitas. Dengan adanya perencanaan jangka menengah, perubahan kurikulum tidak hanya berhenti sebagai proyek musiman, melainkan menjadi bagian dari budaya mutu sekolah.

Akhirnya, kegiatan ini menegaskan pentingnya kerja sama antara institusi pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini membawa manfaat timbal balik: bagi sekolah, pendampingan akademisi meningkatkan kapasitas internal dan kualitas layanan; bagi kampus, program ini menjadi sarana penerapan keilmuan dan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Sinergi inilah yang menjadi inti dari semangat *Merdeka Belajar* dan penguatan ekosistem Pendidikan.

B. Pembahasan

Hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat di MIS Thariqul Huda Tulungagung menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis karakteristik komunitas selingkar sekolah merupakan pendekatan yang relevan dan strategis dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka. Temuan ini menegaskan bahwa kurikulum yang dikembangkan secara kontekstual—berangkat dari analisis kebutuhan riil sekolah dan masyarakat—lebih berpotensi menjawab tantangan internal dan eksternal satuan pendidikan dibandingkan pendekatan kurikulum yang bersifat seragam dan administratif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *school-based curriculum development* (SBCD) yang menempatkan sekolah sebagai aktor utama dalam merancang kurikulum sesuai dengan kekhasan lingkungan, peserta didik, dan sumber daya yang dimiliki (Marsh, n.d.; Gordon et al., n.d.).

Pada fase lokakarya, peningkatan pemahaman guru dan pimpinan madrasah terhadap analisis kebutuhan sekolah menunjukkan bahwa selama ini pengembangan program pendidikan cenderung berorientasi pada rutinitas administratif, bukan pada refleksi kontekstual. Padahal, berbagai studi menegaskan bahwa analisis

kebutuhan merupakan fondasi utama dalam pengembangan kurikulum yang efektif dan berkelanjutan (Marsh, n.d.). Keterlibatan guru dalam memetakan aspek geografis, demografis, sosial-keagamaan, serta posisi kelembagaan madrasah memperkuat kesadaran bahwa kurikulum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial tempat sekolah berada. Temuan ini mendukung pandangan Nkonkonya dan Sithabile (2024) yang menekankan pentingnya integrasi suara dan kebutuhan komunitas dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik.

Lebih lanjut, hasil lokakarya menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap regulasi Kurikulum Merdeka meningkat secara signifikan. Hal ini penting mengingat Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih luas kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional sekolah. Namun, otonomi tersebut juga menuntut kapasitas literasi kebijakan yang memadai dari guru dan kepala sekolah. Tanpa pemahaman yang baik terhadap capaian pembelajaran dan kerangka kebijakan nasional, fleksibilitas kurikulum justru berpotensi disalahartikan atau dimanfaatkan secara minimalis. Temuan ini menguatkan argumen Abidin et al. (n.d.) bahwa desentralisasi kurikulum hanya akan efektif apabila diimbangi dengan penguatan kapasitas perancang kurikulum di tingkat sekolah.

Pada fase pendampingan, revisi visi dan misi madrasah menjadi salah satu capaian penting yang menunjukkan pergeseran paradigma kelembagaan. Visi dan misi yang sebelumnya bersifat normatif dan generik mulai dirumuskan secara lebih operasional dan kontekstual. Proses ini mencerminkan praktik *school visioning*, yaitu keterlibatan kolektif warga sekolah dalam merumuskan arah strategis lembaga secara reflektif dan berorientasi masa depan (Senge et al., n.d.). Visi dan misi yang jelas dan kontekstual tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan kurikuler dan pengembangan program sekolah.

Penguatan identitas madrasah melalui perumusan keunggulan khas juga memiliki implikasi strategis dalam konteks persaingan antar lembaga pendidikan. Dalam lingkungan dengan banyak sekolah sejenis, diferensiasi berbasis nilai lokal, tradisi keagamaan, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya tarik dan

kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Porter et al. (2020) yang menegaskan bahwa pelibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan arah kurikulum dapat menghasilkan desain pendidikan yang lebih kuat dan adaptif terhadap tuntutan lingkungan.

Fase kerja mandiri memperlihatkan bahwa guru mampu menerjemahkan hasil analisis dan pendampingan ke dalam draf Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang lebih autentik. Integrasi nilai-nilai keagamaan lokal, strategi pembelajaran diferensiatif, proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila berbasis konteks, serta pemanfaatan teknologi sederhana menunjukkan bahwa transformasi kurikulum tidak selalu bergantung pada sumber daya yang besar. Sebaliknya, kreativitas dan pemahaman konteks menjadi kunci utama. Temuan ini mendukung hasil penelitian Catacutan dan Abendan (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan integrasi teknologi dalam kurikulum lebih ditentukan oleh kompetensi dan adaptabilitas guru dibandingkan kecanggihan perangkat yang digunakan.

Secara keseluruhan, program ini juga memperlihatkan perubahan peran guru dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi perancang pembelajaran dan kurikulum. Perubahan ini penting dalam membangun budaya profesional dan kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Hallinger (2011) menegaskan bahwa kepemimpinan pembelajaran yang efektif ditandai oleh keterlibatan aktif guru dan kepala sekolah dalam proses refleksi, perencanaan, dan inovasi pendidikan. Dalam konteks ini, pendampingan akademisi berperan sebagai katalis yang mempercepat proses transformasi tersebut.

Meskipun demikian, tantangan yang muncul—seperti ketimpangan literasi kurikulum, keterbatasan waktu, dan pengalaman guru dalam asesmen alternatif—menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis sekolah merupakan proses berkelanjutan, bukan kegiatan sekali selesai. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan jangka menengah, forum berbagi praktik baik, serta penguatan kapasitas internal sekolah. Dengan pendekatan tersebut, kurikulum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi tuntutan kebijakan nasional, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai instrumen

peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi pendidikan bagi masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa ketika pelatihan dan program pendampingan yang tepat diintegrasikan ke dalam Madrasah, meskipun Madrasah tersebut merupakan Madrasah kecil, pedesaan, dan non-publik, hal itu dapat memberdayakan Madrasah untuk mengembangkan kurikulum Madrasah yang berkualitas. Program pengabdian masyarakat ini terbukti berhasil dalam mempersiapkan fondasi penting bagi para pemangku kepentingan Madrasah di MIS Thoriqul Huda Tulungagung untuk mengembangkan kurikulum Madrasah mereka sendiri.

Selanjutnya, setelah program pengabdian masyarakat ini, disarankan kepada para pemangku kepentingan di MIS Thoriqul Huda Tulungagung untuk melakukan peninjauan publik terhadap prototipe kurikulum dan/atau dokumen persiapan pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ibu Ada'i, kepala sekolah MIS Thariqul Huda Tulungagung, dan seluruh guru atas dukungan dan kerja sama mereka selama program pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kami haturkan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang telah berkenan membantu biaya untuk pengabdian masyarakat ini. Yang terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd. yang telah berkenan menjadi narasumber pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR RUJUKAN

Abidin, D., Retnaningrum, E., Parinussa, J. D., & Kuning, D. S. (n.d.).
Curriculum Development in Indonesia from a Historical Perspective.
4(2), 443-451.

- Arifin, M. (2024). *Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Dampaknya terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas*. 15(2), 234–247.
- Catacutan, A. B., & Abendan, C. F. K. (2023). *Competence-Based Curriculum Development in a Globalized Education Landscape*. 1(4), 270–282.
- Concepts, K., Curriculum, U., & Marsh, C. J. (n.d.). *Key Concepts for Understanding Curriculum*.
- Fransiscus, X., Ingsaputro, M. H., Hukum, F., Doktor, U., & Watkat, F. X. (2024). *PERUNDUNGAN (BULLYING) DI LINGKUNGAN*. 31–46.
- Gordon, W. R., Taylor, R. T., & Oliva, P. F. (n.d.). *DEVELOPING Developing*.
- Hallinger, P. (2011). *Leadership for learning : lessons from 40 years of empirical research*. 49(2), 125–142.
<https://doi.org/10.1108/09578231111116699>
- Hidayat, M. H., Basuki, I. A., & Akbar, S. (2018). *Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar*. 2017, 810–817.
- Irnidayanti, Y., & Fadhilah, N. (n.d.). *Teaching Quality in Indonesia : What Needs to Be Improved ?* 225–244.
- Nkonkonya, K., & Sithabile, M. (2024). *Community voices in curriculum development*. *Curriculum Perspectives*, 44(1), 49–60.
<https://doi.org/10.1007/s41297-023-00223-w>
- Porter, A. L., Portillo, E. C., Gallimore, C. E., Zorek, J. A., & Barnett, S. G. (2020). *Let External Stakeholders Be Your Guide to Curricular Revision*. 84(8). <https://doi.org/10.5688/ajpe8021>
- Senge, P. M., Kleiner, A. R. T., Roberts, C., Ross, R. B., & Smith, B. J. (n.d.). *The Fifth Discipline Fieldbook*.